

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sektor pariwisata memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan dianggap sebagai inovasi yang setara dengan sektor-sektor pembangunan lainnya. Sebagai bagian dari aktivitas ekonomi, sektor pariwisata telah menjadi andalan utama dan prioritas pengembangan bagi banyak negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki potensi wilayah luas dengan berbagai daya tarik wisata yang signifikan, keindahan alam yang melimpah, warisan sejarah budaya yang beragam, serta kehidupan masyarakat yang unik. Pengelolaan pariwisata tidak hanya terkait dengan kegiatan pelestarian lingkungan, keunikan dan daya tarik objek wisata, serta kelompok sosial atau komunitas yang terkait, tetapi juga melibatkan aktivitas lain yang dapat mendukung perekonomian daerah. Pengelolaan objek wisata mencakup pengembangan dan pemanfaatan daya tarik wisata tersebut, serta bagaimana pemerintah dan masyarakat sebagai pelaksana mampu menjaga kelestarian alam, keberagaman budaya, adat istiadat, dan agama.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009, pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu, terencana, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Hal ini dilakukan dengan tetap melindungi nilai-nilai agama, budaya, kelestarian lingkungan hidup, dan keberadaan objek-objek wisata serta kepentingan nasional. Perlindungan ini didukung oleh ketegasan hukum dan konsistensi pemerintah dalam menjaga keaslian dan keamanan objek wisata, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Kepariwisata. Tujuan dari pengembangan pariwisata adalah untuk meningkatkan pemerataan kesempatan berusaha, memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta meningkatkan pendapatan ekonomi, sehingga mampu menghadapi tantangan perubahan baik di tingkat lokal maupun nasional (Paramarta et al., 2009).

Desa wisata adalah daerah pedesaan yang memiliki ciri khusus sebagai destinasi wisata. Di sini, penduduknya masih mempertahankan tradisi dan budaya yang autentik. Selain itu, faktor pendukung seperti kuliner khas, sistem pertanian, dan sistem sosial juga memberikan ciri khas tersendiri bagi desa wisata tersebut. Keaslian alam dan lingkungan yang terjaga menjadi faktor penting lainnya dari kawasan tujuan wisata. Desa wisata menawarkan keaslian dalam segi sosial budaya, tradisi, kehidupan sehari-hari, arsitektur tradisional, dan tata ruang desa, yang diintegrasikan dalam bentuk atraksi wisata, akomodasi, serta fasilitas pendukung lainnya (Zakaria & Suprihardjo, 2014).

Desa Biting, yang terletak di Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor pariwisata. Potensi yang signifikan ini memerlukan pengelolaan yang tepat dan efektif dari pemerintah desa. Pemerintah desa diharapkan dapat menjalankan peran proaktif dalam memfasilitasi, mengarahkan, dan mengelola pengembangan sektor pariwisata. Sebagai garda terdepan, pemerintah desa bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang kondusif, tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk pelestarian lingkungan dan kearifan lokal. Upaya ini penting untuk menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh sektor pariwisata dan keberlanjutan lingkungan serta nilai-nilai lokal.

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Desa Wisata, serta Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 188.45/1769/405.29/2017, menetapkan Desa Biting sebagai salah satu desa wisata yang sesuai dengan potensi wilayah di Kabupaten Ponorogo. Peraturan ini menegaskan pentingnya pengakuan terhadap potensi wilayah, termasuk sumber daya alam dan budaya. Desa wisata yang dipilih harus sesuai dengan karakteristik dan daya tarik wilayahnya. Desa Biting memperlihatkan upaya untuk mengoptimalkan potensi lokal dalam pengembangan pariwisata, sekaligus sebagai bentuk penghargaan terhadap kekayaan alam dan budaya Kabupaten Ponorogo.

Wisata unggulan di Desa Biting, Kecamatan Badegan, meliputi Taman Sumorobangun *Flower* dan Paralayang. Taman Sumorobangun *Flower* merupakan rest area yang dihiasi dengan pemandangan taman bunga, yang

mencerminkan kearifan lokal Desa Biting, serta dilengkapi dengan jembatan penghubung yang terkenal sebagai "jembatan pelangi." Wahana paralayang Desa Biting terletak di Bukit Plered, yang berdekatan dengan Taman Sumorobangun Flower, dan kini menjadi pusat perhatian baru dengan wisata olahraga ekstrem seperti paralayang. Kegiatan paralayang di Bukit Plered memungkinkan pengunjung menikmati panorama Desa Biting dari udara, menawarkan pengalaman yang unik. Kegiatan ini tidak hanya menarik wisatawan tetapi juga memberikan pemasukan bagi pengelola wisata setempat saat diadakan *event* kejuaraan. Bukit Plered memenuhi standar untuk *take-off* dan *landing* dengan kondisi udara dan kecepatan angin yang mendukung. Mengingat potensi besar yang dimiliki oleh Taman Sumorobangun *Flower* dan Bukit Plered serta manfaat ekonominya, tata kelola yang tepat dan berkelanjutan oleh pemerintah desa menjadi sangat penting.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai tata kelola pemerintahan desa dalam pengembangan sektor pariwisata di Desa Biting, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, diperlukan studi yang lebih komprehensif dan rinci. Saat ini, belum terdapat penelitian ilmiah yang secara khusus membahas topik ini. Namun, untuk menambah referensi penelitian ini dan membandingkan permasalahan yang diteliti dengan penelitian sebelumnya, beberapa penelitian dikutip sebagai berikut. Penelitian pertama ditulis oleh Nur Aeni et al., (2021) melalui jurnal berjudul "Sinergitas Bumdes dalam Manajemen Pengelolaan Desa Wisata Menuju Pariwisata Berkelanjutan". Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sinergitas BUMDES dalam manajemen pengelolaan desa wisata. Permasalahan utamanya adalah rendahnya pengetahuan manajemen pengelolaan desa wisata. Terdapat tiga aspek utama yang menjadi penyebab pengelolaan desa wisata, yaitu sumber daya manusia, infrastruktur, dan partisipasi. Ketiga aspek ini memerlukan pembenahan untuk menciptakan desa wisata yang unggul. Prioritas solusi pada aspek sumber daya manusia dilakukan melalui sosialisasi manajemen pengelolaan desa wisata dan peningkatan literasi pengembangan desa wisata kepada masyarakat lokal. Solusi pada aspek infrastruktur dilakukan dengan peremajaan dan monitoring sarana serta prasarana yang ada agar selalu terjaga kualitasnya. Sementara itu,

solusi untuk permasalahan partisipasi yang rendah dilakukan dengan mengintegrasikan semua unsur penunjang desa wisata, terutama badan usaha milik desa (BUMDES) dan pengrajin lokal yang ada di Desa Munding. Melalui faktor-faktor kunci ini, diharapkan Desa Munding dapat menjadi desa wisata yang memiliki nilai jual lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian kedua yang ditulis oleh Jusmiati & Arfin, (2017) dalam jurnal berjudul “Tata Kelola Air Terjun Mata Buntu di Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur” menggunakan pendekatan kualitatif sehingga data yang digunakan bersifat kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata kelola Air Terjun Mata Buntu di Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu prosedur yang dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber tertulis dari hasil observasi dan sumber lisan dari hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Air Terjun Mata Buntu saat ini masih dilakukan secara spontan dan terbatas oleh masyarakat setempat, sehingga dibutuhkan konsep tata kelola yang lebih terstruktur. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain kurangnya perencanaan jangka panjang, sehingga masyarakat hanya mengelola berdasarkan peluang yang ada. Permasalahan utama dalam tata kelola Air Terjun Mata Buntu meliputi kurangnya keterlibatan pemerintah daerah, ketiadaan regulasi yang jelas, pengelolaan yang terbatas dan tidak terencana oleh masyarakat, serta kurangnya struktur dan fungsi manajemen yang baik. Disarankan agar setiap tahap manajemen, termasuk perencanaan, dilakukan dengan memberikan pelatihan perencanaan kepada masyarakat untuk jangka panjang, serta meningkatkan peran aktif pemerintah dalam pengelolaan wisata tersebut.

Penelitian ketiga yang ditulis oleh Safitri, (2019) dalam jurnal berjudul “Tata Kelola Kepariwisata Berbasis Masyarakat di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara” menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tata kelola kepariwisataan berbasis masyarakat di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, khususnya di Desa Lero. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek wisata di Desa Lero dikelola langsung oleh masyarakat dengan tujuan menjadikan Desa Lero sebagai desa wisata yang mandiri. Namun, dalam pengelolaannya, masyarakat menghadapi kendala pada sumber daya dalam pengembangan objek wisata serta aksesibilitas menuju objek wisata. Masyarakat berharap bahwa pengelolaan objek wisata berbasis masyarakat dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

Penelitian keempat yang ditulis oleh Ayu Ningrum, (2016) dalam jurnal berjudul “Studi Penerapan *Good Governance* dalam Pengelolaan Desa Wisata Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Tahun 2012-2014” menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan desa wisata. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu usaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada, kemudian menganalisis, meneliti, menggambarkan, dan menelaah berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi, dan fenomena yang diselidiki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan Desa Wisata Kampung Bandar, yang menyebabkan pengelolaan pariwisata di Kampung Bandar belum optimal. Hal ini menciptakan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat akan pariwisata dengan minimnya peran pemerintah dalam memenuhinya. Ada dua faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerapan *good governance* dalam pengelolaan desa wisata. Pertama, hubungan antara tiga komponen penting dalam *good governance*, yaitu masyarakat, pemerintah, dan swasta, belum optimal. Kedua, pemerintah belum menerapkan budaya pemerintahan yang mendukung prinsip-prinsip *good governance*.

Penelitian terdahulu digunakan sebagai upaya peneliti dalam mencari perbandingan dan sebagai sumber inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah Dalam konteks geografis, penelitian ini berfokus pada Desa Biting di Kabupaten Ponorogo, yang memiliki potensi wisata seperti Taman Sumorobangun Flower dan Bukit Plered. Hal ini memberikan ruang lingkup yang spesifik dan berbeda

dibandingkan dengan lokasi-lokasi lain yang pernah diteliti. Penelitian ini juga menekankan peran pemerintah desa dalam pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata. Fokus pada peran pemerintah desa ini memberikan sudut pandang baru dalam memahami bagaimana kebijakan dan tindakan pemerintah setempat dapat mempengaruhi pengembangan pariwisata di tingkat desa. Dalam hal objek wisata, penelitian ini mengkaji objek wisata spesifik yang ada di Desa Biting, yang berbeda dengan objek wisata di lokasi lain yang pernah diteliti. penelitian ini juga berfokus pada tata kelola pemerintah desa dalam konteks pengembangan pariwisata, dengan mencakup keseimbangan antara manfaat ekonomi, pelestarian lingkungan, dan nilai-nilai lokal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam studi tata kelola pemerintah desa di sektor pariwisata, khususnya di Desa Biting, dengan mengkaji bagaimana pemerintah desa dapat mengelola dan mengembangkan potensi wisata secara berkelanjutan, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh sektor pariwisata dan keberlanjutan lingkungan serta nilai-nilai lokal

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut yaitu, bagaimana tata kelola yang dijalankan pemerintah desa dalam pengembangan sektor pariwisata di Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan tata kelola pemerintah desa dalam pengembangan sektor pariwisata di Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, informasi baru maupun penambahan wawasan pengetahuan khususnya pengetahuan tentang tata kelola pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata di

Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Serta dapat menjadi sarana pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh penulis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan akademis dalam bidang pengembangan wisata. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi atau teori dalam melakukan penelitian selanjutnya yang serupa dan diharapkan bisa memberikan gambaran umum tentang tata kelola pemerintah desa dalam pengembangan sektor Pariwisata.

E. PENEGASAN ISTILAH

1. Tata Kelola

Menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) tata kelola adalah struktur dan proses yang digunakan untuk menentukan tujuan organisasi, serta cara dan sumber daya yang dipakai untuk mencapainya. Ini melibatkan pengawasan perusahaan, manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi, dan transparansi terhadap pemangku kepentingan. Tata kelola mencakup beberapa elemen, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Tata kelola pemerintahan yang efektif adalah mencerminkan sifat-sifat *good government* dan memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional, daerah, maupun desa. Tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa adalah langkah untuk menyelenggarakan pemerintahan desa secara profesional, efisien, dan efektif, serta transparan dan bertanggung jawab, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ali & Saputra, 2020).

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan publik oleh pemerintah. Implementasi pelayanan publik yang mengikuti prinsip-prinsip *good governance* menuntut keterlibatan seluruh komponen, termasuk sektor swasta dan masyarakat, bukan hanya bergantung pada pemerintah (Cahya & Wibawa, 2019).

2. Pengembangan Sektor Pariwisata

Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, kepariwisataan mencakup berbagai kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas dan layanan yang disediakan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Secara umum, pariwisata merujuk pada perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam periode waktu tertentu. Pengembangan kegiatan pariwisata di suatu wilayah bertujuan untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan pendapatan devisa bagi pemerintah daerah, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, pariwisata juga berperan dalam melindungi aspek-aspek sosial, budaya, dan fisik dari masyarakat lokal, karena aspek ini dianggap sebagai nilai tambah yang dapat menarik wisatawan dan perlu dipertahankan untuk keberlanjutan industri pariwisata.

Pengembangan wisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada di dalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. Pengembangan wisata mengacu pada serangkaian upaya yang dilakukan untuk meningkatkan potensi dan daya tarik pariwisata suatu daerah. Tujuan pengembangan wisata adalah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, mengoptimalkan pendapatan dari sektor pariwisata, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Secara keseluruhan, pengembangan wisata melibatkan serangkaian tindakan yang komprehensif dan terintegrasi, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan serta mencapai tujuan pengembangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses ini, kerja sama dan kolaborasi antara berbagai pihak terlibat sangat penting guna mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan (Ermiwati, 2019).

F. LANDASAN TEORI

1. *Good Governance*

Penelitian ini menggunakan konsep teori *Good Governance* karena relevannya dengan konteks penelitian ini. *Good governance* merupakan pendekatan yang mengutamakan pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang bertanggung jawab (Ika Wardani et al., 2019). Konsep ini menekankan pentingnya pemerintah dalam menjalankan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mencegah korupsi, dan menjalankan manajemen keuangan yang disiplin untuk memastikan kelangsungan aktivitas pemerintahan (Oktarina et al., 2016). *Good Governance* mewakili upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan, yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Indriana & Nasrun, 2019).

Good Governance adalah pendekatan yang menitikberatkan pada pengembangan sektor publik oleh pemerintahan yang efektif. Konsep *good governance* telah menjadi topik yang signifikan dalam berbagai konteks pemerintahan akhir-akhir ini, karena mencerminkan perubahan pola lama dalam administrasi pemerintahan yang tidak lagi sesuai dengan perubahan dalam masyarakat atau semakin tidak efektifnya dalam konteks berkembangnya demokrasi, hak asasi manusia, dan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. Beberapa ahli dan teoretisi administrasi menyarankan agar peran pemerintah lebih difokuskan pada peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kesepakatan yang terbentuk melalui diskusi di ruang publik (Surahman & Nazaruddin, 2021).

Kedaulatan rakyat sebagai prinsip fundamental tentang kekuasaan telah diterapkan di sini. Dalam konteks ini, pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tidak hanya bergantung pada pemerintah semata, tetapi mengharuskan partisipasi dari semua elemen, termasuk birokrasi internal, masyarakat, dan sektor swasta. Konsep ini menekankan bahwa pemikiran yang efektif hanya bisa terwujud jika pemerintahan berada dekat dengan yang diperintah, atau dengan kata lain,

melalui desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan adanya pemerintahan yang desentralistik, tercipta ruang demokrasi bagi masyarakat lokal untuk aktif berpartisipasi dalam menentukan nasib mereka, serta mengutamakan kepentingan rakyat melalui pemerintahan daerah yang transparan, terbuka, jujur, dan bertanggung jawab, sebagai prasyarat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan mampu memenuhi standar kepatutan dalam pengelolaan pemerintahan (*good governance*). Dengan paradigma *good governance* sebagai alternatif penyelenggaraan pemerintahan, potensi dari masing-masing pemangku kepentingan dapat dioptimalkan untuk mengatasi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga diperlukan dukungan untuk mengembangkan kreativitas dan aktivitas yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, demokratisasi, serta kemandirian daerah (Bonai & Lambelanova, 2023).

Dalam upaya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi saat ini harus memperhatikan prinsip-prinsip penting seperti demokrasi, pemberdayaan, pelayanan yang responsif, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kemitraan, desentralisasi, konsistensi kebijakan, dan kepastian hukum. Prinsip-prinsip ini minimal harus dipenuhi untuk menciptakan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik pada zaman ini. Dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara umum, untuk mewujudkan paradigma *good governance* sebagai kerangka kerja dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, tidaklah mudah. Hal ini memerlukan tekad yang kuat dari berbagai pihak yang terlibat untuk mewujudkannya (Zulkarnain & Mitrayanti, 2020).

1. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Membangun pemerintahan yang baik merupakan merupakan cita-cita semua negara baik dari tingkat pusat maupun tingkat terendah yaitu desa. Oleh karena itu, dalam menjalankan pemerintah desa perlu

menerapkan tata pemerintahan yang baik yang ada dalam masyarakat sebagai perwakilan pemerintahan yang bersih dan jujur. Dalam menerapkan *good governance*, hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam adalah memahami prinsip-prinsipnya. Tolok ukur kinerja pemerintah diperoleh berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

Pokok utama dalam memahami *good governance* adalah mampu memahami prinsip yang terdapat didalamnya. Baik buruknya tata kelola pemerintah dapat dilihat dari semua prinsip-prinsip yang terlaksana dalam suatu pemerintahan (Rosyada, 2016). Menurut Ika Wardani et al., (2019) Tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu sama lainnya dalam mengimplementasikan *Good Governance*, yaitu : Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), dan Partisipasi (*Participation*). penjelasan dari indikator *Good Government* adalah sebagai berikut:

1) *Transparansi (Transparency)*

Keterbukaan atau transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hal ini sangat penting karena dengan adanya transparansi, masyarakat desa dapat mengetahui dengan jelas segala bentuk aktivitas pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat desa. Transparansi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan program-program pembangunan, hingga pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Dengan keterbukaan, pemerintah desa dapat membangun kepercayaan dari warganya, yang pada akhirnya akan memperkuat partisipasi dan dukungan masyarakat dalam setiap kegiatan pemerintah desa. Transparansi juga menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada warganya. Melalui transparansi, pemerintah desa menunjukkan komitmennya untuk bekerja dengan jujur dan akuntabel.

2) *Akuntabilitas (Accountability)*

Akuntabilitas atas semua keputusan dan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan adalah prinsip yang sangat penting dalam

tata kelola pemerintahan desa yang baik. Akuntabilitas berarti bahwa pemerintah desa, termasuk kepala desa dan seluruh perangkatnya, harus bertanggung jawab atas setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan yang mereka buat. Akuntabilitas juga berarti bahwa pemerintah desa harus siap menerima kritik, saran, dan masukan dari masyarakat. Setiap warga desa berhak mengetahui bagaimana keputusan yang diambil akan mempengaruhi mereka dan desa mereka, Akuntabilitas juga mencakup evaluasi dan pelaporan berkala atas kemajuan dan hasil dari kebijakan atau proyek yang telah dijalankan. Pemerintah desa harus secara rutin mengadakan evaluasi terhadap proyek-proyek yang telah dilaksanakan dan melaporkan hasilnya kepada masyarakat. Evaluasi ini tidak hanya mencakup aspek keberhasilan dan pencapaian, tetapi juga kendala dan masalah yang dihadapi, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya.

3) Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan elemen krusial yang tidak hanya memberikan masukan dan dukungan, tetapi juga kontrol terhadap jalannya pemerintahan desa. Partisipasi ini mencerminkan demokrasi di tingkat akar rumput, di mana setiap warga desa memiliki suara dan peran dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan desa mereka. Dukungan masyarakat juga sangat penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan berbagai proyek pembangunan. Dukungan ini bisa berupa partisipasi fisik, seperti bergotong royong dalam pembangunan infrastruktur pariwisata, maupun dukungan moral dan sosial yang memperkuat semangat kolektif dan solidaritas di antara warga desa. Partisipasi masyarakat juga mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Ketika masyarakat terlibat aktif, pemerintah desa akan lebih terdorong untuk bekerja dengan jujur, terbuka, dan bertanggung jawab, karena mereka diawasi langsung oleh warga.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional dalam penelitian ini berfungsi untuk mendefinisikan variabel secara operasional dan berdasarkan karakteristik yang diamati, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Definisi operasional bertujuan untuk mengoperasionalkan penelitian yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan untuk mendapatkan hasil atau *output* pada penelitian ini. Definisi operasional dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dalam tata kelola pemerintah desa dan pengembangan sektor pariwisata di Desa Biting mencakup tingkat aksesibilitas informasi bagi masyarakat dan aparatur pemerintah terhadap pengelolaan keuangan desa khususnya di Sektor Pariwisata, kejelasan informasi yang disediakan oleh pemerintah desa terkait pariwisata, dan tingkat partisipasi masyarakat serta aparatur pemerintah dalam seluruh proses perumusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan dan program pariwisata.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas dalam tata kelola pemerintah desa dan pengembangan sektor pariwisata di Desa Biting meliputi kemampuan aparatur pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan dan kebijakan, ketersediaan mekanisme dan prosedur yang jelas untuk memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya serta pelaksanaan kegiatan pariwisata, serta penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pariwisata berdasarkan analisis cost and benefit yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

3. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi dalam tata kelola pemerintah desa dan pengembangan sektor pariwisata di Desa Biting mencakup tingkat keterlibatan masyarakat dan stakeholder terkait dalam pengambilan keputusan terkait pariwisata, kemungkinan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, dan kebutuhan terkait pengembangan pariwisata, serta peningkatan kapasitas dan

kesempatan bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan pariwisata.

H. METODOLOGI PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data. Data tersebut diperoleh melalui penelitian kualitatif dengan data yang didapatkan dari sumber yang berbeda dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda dan dilakukan secara terus menerus hingga data tersebut jenuh. mendefinisikan pendekatan penelitian merupakan perencanaan dan pelaksanaan penelitian yang mencakup pada langkah-langkah dari asumsi umum hingga pada metode pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang terperinci. Rencana ini dapat melibatkan beberapa keputusan, dan keputusan tersebut tidak perlu dibuat berupa urutan yang logis. Sedangkan penelitian kualitatif dalam skala besar adalah suatu pendekatan untuk menggali dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian melibatkan memunculkan pertanyaan dan tindakan, data biasanya dikumpulkan dalam pengaturan peserta, analisis data dibangun secara induktif dari topik tertentu ke topik umum, dan peneliti membuat interpretasi makna data. Laporan tertulis akhir memiliki struktur yang fleksibel. Mereka yang terlibat dalam jenis bentuk penyelidikan ini mendukung pandangan penelitian yang menghargai metode induktif, fokus pada makna individu, dan pentingnya menerjemahkan kompleksitas situasi (Creswell, 2018).

Pendekatan kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2012). Bentuk operasional penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang umumnya melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, mencangkup narasi, cerita, pengaturan informan, dokumen pribadi berupa foto, catatan pribadi

dan lainnya untuk mengetahui strategi pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan untuk penelitian terkait fokus penelitian yang bisa diambil sebuah informasi maupun data yang diperlukan. Lokasi sangat penting bagi penelitian karena memiliki tujuan untuk mempermudah dan untuk kelancaran serta kejelasan mengenai sasaran yang akan diteliti. Lokasi penelitian ini akan fokus pada Desa Biting yang terletak di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor pariwisata. Keindahan alam, warisan budaya, dan aspek-aspek lainnya menjadikan Desa Biting sebagai fokus utama dalam memahami strategi pemerintah desa dalam pengembangan pariwisata. Dengan mengeksplorasi dinamika lokal di Desa Biting, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemahaman yang mendalam terkait tata kelola pemerintah desa dalam mengoptimalkan potensi pariwisata.

3. Subjek/Informan Penelitian

Dalam studi kualitatif, informan adalah orang atau sumber yang memahami topik penelitian. Untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan akan bermanfaat bagi penelitian, metode *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan. Untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih relevan, teknik pemilihan sampel yang bertujuan digunakan dalam pemilihan informan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui terdapat beberapa metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti (Linarwati et al., 2016).

Wawancara sebagai metode alternatif dalam pengumpulan data. Wawancara biasanya dilakukan secara tatap muka. Wawancara kualitatif pada dasarnya adalah percakapan di mana peneliti menetapkan arah percakapan secara umum dan idealnya mengikuti topik tertentu yang diangkat oleh informan, karena dalam wawancara ini informanlah yang paling banyak berbicara. Metode ini digunakan untuk mencari informasi mendalam secara langsung dengan dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) dan wawancara dilakukan dengan semi terstruktur.

Wawancara Semi-terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan tetap mengacu pada pertanyaan wawancara akan tetapi pertanyaan- pertanyaannya bisa keluar dari instrumen pertanyaan yang telah dibuat. Kelebihan dari jenis wawancara ini lebih mendalam dan data yang diperoleh lebih lengkap. Pengambilan data dengan menggunakan teknik wawancara dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam mengenai proses tata kelola pemerintah dalam pengembangan sektor wisata di Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

b. Dokumentasi

Dokumentasi Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan informasi baik berupa tulisan, gambar atau karya manusia. Metode ini digunakan untuk melengkapi data penelitian kualitatif dari wawancara dan data observasi dari dokumen, foto dan rekaman. Metode dokumenter ini merupakan cara yang mudah untuk mengumpulkan data karena peneliti hanya mengamati. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, agenda, transkrip, buku dan lain sebagainya (Arischa, 2019).

c. Observasi

Observasi merupakan cara atau metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena

yang sedang dijadikan sasaran pengamatan (Mania, 2017). Menurut Burhan Bungin, ada 2 tipe observasi partisipan dan observasi tidak langsung. Observasi partisipan adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan diri dalam kegiatan pembentukan agen atau masyarakat yang diteliti. Sedangkan observasi tidak langsung merupakan observasi di mana peneliti tidak masuk ke dalam masyarakat tersebut. Bisa saja hanya melihat dengan sepasang matanya mengenai kegiatan dan benda-benda budaya atau dibantu dengan alat-alat lainnya seperti kamera. Sehingga dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini, observasi yang digunakan adalah observasi tidak langsung (Bungin Burhan, 2007). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi ini dapat digunakan untuk pengumpulan data terkait dengan gambaran umum tata kelola pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata.

5. Metode Analisis Data

Pengertian analisis data sebagai upaya mencari data dan menata sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna analisis data dapat digunakan dalam penelitian kualitatif pada waktu pengumpulan data terjadi, atau setelah dari pengumpulan data selesai dalam rangka waktu tertentu (Rijali, 2018).

Dalam penelitian ini perlu digunakannya analisis data supaya penelitian ini dapat terlaksana dengan baik sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses penelitian. Model analisis data yang digunakan peneliti adalah model dari (Milles et al., 2014) dalam bukunya *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Komponen dalam analisis datanya sebagai berikut:

a. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Kondensasi data mengacu pada proses memilih, mengkonsentrasikan, menyederhanakan, meringkas, menulis catatan

lapangan, transkrip wawancara, dokumen dan bahan percobaan lainnya. Dengan mengompresi, buat data lebih kuat. Kondensasi data adalah bentuk analisis yang memurnikan, memilah, memusatkan, menggabungkan, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan kondensasi data, itu tidak selalu menyiratkan pengukuran kuantitatif. Data kualitatif dapat diubah dalam berbagai cara melalui seleksi, melalui ringkasan atau parafrase, dengan menanamkannya ke dalam pola yang lebih besar, dan seterusnya. Kesimpulannya adalah proses kondensasi data diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan memperoleh data tertulis di lapangan, dari teks wawancara, kemudian dipilah untuk mendapatkan fokus penelitian yang peneliti butuhkan (Milles et al., 2014).

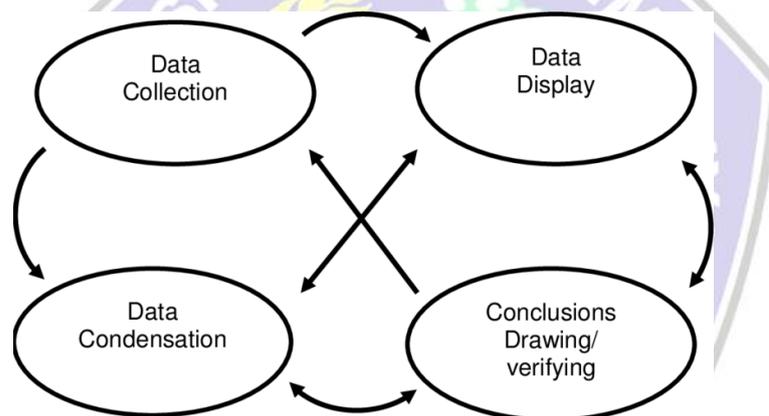
b. *Data Display* (Penyajian Data)

Secara luas mendefinisikan penyajian data sebagai informasi yang mengatur, menggabungkan, dan menyimpulkan. Menyajikan data di sini juga membantu dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih mendalam. Semuanya dirancang untuk mengumpulkan informasi terstruktur dalam bentuk yang ringkas dan mudah diakses sehingga analis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menarik kesimpulan yang dapat dibenarkan atau beralih ke langkah analisis berikutnya yang disarankan oleh penawaran yang mungkin berguna. Dengan melihat pemaparan, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang perlu dilakukan, melakukan analisis lebih lanjut atau mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari pemaparan tersebut (Milles et al., 2014).

c. *Conclusions Drawing* (Menarik Kesimpulan)

Analisis ketiga adalah menarik kesimpulan. Pengkodean data, misalnya (kondensasi data), mengarah pada ide-ide baru tentang apa yang harus dilakukan dengan data (penyajian data). Memasukkan data membutuhkan lebih banyak kondensasi data. Saat Anda mengisi data, kesimpulan awal ditarik, tetapi itu mengarah pada pengambilan

keputusan, misalnya, menambahkan kolom lain ke data untuk menguji kesimpulan. Kesimpulan disini ditarik oleh peneliti dari awal peneliti dengan mengumpulkan data seperti mencari pengertian yang tidak berpola, mengamati keteraturan penafsiran, alur sebab akibat, dan tahap terakhir dengan melengkapi semua data yang diperoleh oleh peneliti. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam penelitian kualitatif ini merupakan hasil baru, dengan kata lain basilnya masih kabur atau belum jelas. Disini peneliti mencoba mengklarifikasi dengan menggunakan teori yang sudah teruji keberhasilannya, kemudian peneliti menganalisis hasil baru tersebut hingga menjadi jelas dengan menggunakan komponen komponen analisis data yaitu kondensasi data (*data condensation*), tampilan data (*data display*), dan menarik kesimpulan (Milles et al., 2014)



Gambar 1. Bagan Model Analisis Data
(Sumber : Miles, Huberman, dan Saldana, 2014)

6. Keabsahan Data

Validitas data atau keabsahan data merujuk pada evaluasi terhadap kebenaran data yang dihasilkan dalam suatu penelitian, dengan penekanan pada kualitas data dan informasi yang diperoleh daripada pada sikap dan jumlah orang yang terlibat. Secara prinsip, dalam sebuah penelitian, pengujian keabsahan data hanya berfokus pada pengujian validitas dan reliabilitas. Demi mencegah kesalahan dalam data yang terkumpul, dilakukan verifikasi keabsahan data, Verifikasi keabsahan data dilakukan melalui kriteria kepercayaan yang melibatkan teknik triangulasi, ketekunan

dalam pengamatan, dan pengecekan bersama dengan kolega sejawat (Denzin, 1978)

Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi metode triangulasi, pendekatan multi-metode merujuk pada penggunaan berbagai metode dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara komprehensif. Triangulasi merupakan suatu konsep yang mengacu pada verifikasi atau penegasan data melalui penggunaan berbagai sumber informasi. Apabila dianggap perlu, data dapat diuji kebenarannya melalui perbandingan dengan data lain yang relevan. Informan yang terlibat dalam penelitian juga dapat diajak untuk memberikan klarifikasi dan elaborasi lebih lanjut terkait dengan data yang telah dikumpulkan. Dalam situasi ini, dokumen seperti hasil wawancara, data observasi, dan dokumentasi saling terhubung dan tidak dapat dibedakan satu sama lain agar memperoleh data yang valid. Triangulasi pada dasarnya merupakan suatu metode untuk memverifikasi keakuratan data dan menentukan apakah data tersebut secara tepat menggambarkan fenomena yang sedang diteliti (Denzin, 1978).

